PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI BAGI GENERASI PENERUS BANGSA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Mutiah[1], Bintang Nailah Najwa[2], Lady Veronika[3], A.A. Made Cika Andini[4], Ginna Cahya Ayunda[5]

[1,2,3,4,5] *Universitas Tadulako*
E-mail : [1]mutiahtia170707@gmail.com, [2]bintang.naila07@gmail.com,
[3]veronikalady78@gmail.com, [4]cika25072007@gmail.com, [5]ginnaayunda336@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the urgency of anti-corruption character education for the younger generation as an effort to prevent corruption in Indonesia. The increasing number of corruption cases involving various groups reflects a moral crisis that has reduced public trust in government institutions. Therefore, character education is considered an important strategy to instill integrity values from an early age, especially during adolescence. This research employed an empirical juridical method using statutory and field approaches. Data were collected through literature studies and in-depth interviews with six informants at SMA Negeri 3 Palu. The findings show that anti-corruption character education is highly important because adolescence is a critical phase in moral and mindset formation. The values emphasized include honesty, discipline, responsibility, justice, care, courage, hard work, independence, and simplicity, in line with the nine integrity values promoted by the KPK. The implementation of anti-corruption education is carried out through teacher and parent role models, habituation of honest behavior, curriculum integration, and critical discussions. A supportive school and family environment also strengthens anti-corruptive attitudes among adolescents, helping create a generation with integrity. Consequently, systematic and continuous character education is needed to support the realization of a corruption-free Indonesian society.

Keywords : *Character Education, Anti-Corruption, Young Generation, Integrity, Corruption Prevention.*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada permasalahan serius berupa kemerosotan moral yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini tercermin dari maraknya kasus korupsi yang dari waktu ke waktu terus meningkat dan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kepala daerah, anggota legislatif, hingga aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin bangsa (Andi et al, 2023).

Sering kali, korupsi dikaitkan dengan faktor kemiskinan sebagai penyebab utama. Namun, pandangan tersebut dapat diperdebatkan, mengingat banyak pelaku korupsi justru berasal dari kalangan yang berkecukupan. Fenomena ini terjadi karena tindakan korupsi umumnya dilakukan secara tersembunyi, terorganisir, dan sistematis, sehingga pelakunya merasa seolah tidak melakukan kesalahan (Suci, 2025). Bahkan, dalam beberapa kondisi, praktik korupsi telah berkembang menjadi suatu kebiasaan, sehingga dianggap sebagai hal yang lumrah dan justru terasa aneh apabila tidak ikut melakukannya (Amelia et al, 2021).

Tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara serta menghambat proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, berbagai regulasi dan kebijakan telah diterapkan sebagai upaya untuk menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia (Tridian et al, 2024).

Di sisi lain, praktik korupsi juga memberikan dampak negatif terhadap citra Indonesia di mata dunia. Indonesia dapat dipandang sebagai bangsa yang identik dengan perilaku korupsi, sehingga mencoreng reputasi negara. Padahal, Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Maraknya tindak pidana korupsi seakan menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tidak lagi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak individu yang melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila (Alifiyanto, 2022).

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bentuk korupsi yang paling dominan di Indonesia adalah penyuapan, diikuti oleh penyalahgunaan anggaran dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Tingkat korupsi tertinggi tercatat di lingkungan pemerintah pusat, disusul oleh beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Barat. Dilihat dari kelembagaan, kasus korupsi paling banyak terjadi di kementerian dan lembaga negara (274 kasus), kemudian pemerintah daerah (181 kasus), serta pemerintah provinsi (99 kasus). Adapun dari segi profesi, pelaku korupsi didominasi oleh pihak swasta (184 kasus), pejabat eselon I–III (175 kasus), anggota DPR/DPRD (145 kasus), serta hakim (17 kasus) dalam rentang tahun 2004–2007. Fakta ini menegaskan bahwa korupsi bukan lagi sekadar perilaku menyimpang individu, melainkan telah menjadi permasalahan struktural dan sistemik yang memerlukan penanganan secara menyeluruh (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa undang-undang, jurnal, dan penelitian terdahulu, serta wawancara sebagai data primer.

Penelitian dilaksanakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada bulan Maret 2026. Pemilihan Lokasi berdasarkan pertimbangan ketersediaan narasumber dan relevansi konteks karakter yang

sedang dikembangkan di wilayah tersebut. Sumber data primer adalah hasil wawancara mendalam dengan enam narasumber. Sumber data sekunder mencakup dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik lima tahun terakhir.

Tabel 1. Profil Narasumber Penelitian

Nama	Latar belakang	Ket
Iavan Fritz Pongoh	Pelajar/Siswa SMA Negeri 3 Palu	N1
Moh. Romel	Pelajar/Siswa SMA Negeri 3 Palu	N2
Zwitanya Chevicova. M	Pelajar/Siswi SMA Negeri 3 Palu	N3
Meilana Filadelfia	Pelajar/Siswi SMA Negeri 3 Palu	N4
Christin Devita	Pelajar/Siswi SMA Negeri 3 Palu	N5
Yulian Satriono, S.Pd	Pengajar/Guru SMA Negeri 3 Palu	N6

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pendidikan Karakter Bagi Remaja

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh narasumber (N1–N6) sepakat secara konsisten bahwa pendidikan karakter anti-korupsi bagi remaja memiliki urgensi yang sangat tinggi. “Remaja dipandang sebagai masa transisi yang krusial dari anak-anak menuju dewasa” (N4), (N1) “Pendidikan karakter membantu remaja membentuk kepribadian yang baik seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab”. Pernyataan N2 memperkuat pernyataan dari N1 dengan mengatakan bahwa “Pendidikan karakter bagi remaja membantu dalam membentuk sikap, moral, dan kepribadian yang baik sehingga bisa membedakan mana yang benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari”. N6 (pengajar SMAN 3 Palu) “menegaskan bahwa generasi muda merupakan pemegang tongkat estafet kepemimpinan di masa depan”.

Temuan lapangan ini sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh (M. David et., al, 2023) yang menyatakan bahwa Pendidikan anti korupsi dapat memberikan landasan etika yang kuat, mendorong mereka untuk mencapai kesuksesan dengan cara yang jujur dan adil, Pendidikan karakter berpusat pada pembentukan sikap dan nilai-nilai postif seseorang. Konsep Pendidikan karakter yang dapat membantu generasi Z untuk keluar dari persoalan moral, diantaranya :

1. Pendidikan karakter dapat membantu generasi Z memahami nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, empati, dan kejujuran. Membantu generasi Z membuat keputusan yang baik dan berkualitas dalam situasi yang kompleks.
2. Generasi Z dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang identitas mereka sendiri dengan mengembangkan karakter yang kuat, membantu mereka menavigasi tekanan dari norma budaya dan media social yang dapat mempengaruhi moral mereka.
3. Pendidikan karakter mengajarkan mereka kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan baik. Generasi z memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan konflik tanpa mengganggu orang lain.

N3 memberikan jawaban yang lebih menyoroti tentang membangun moral dan resiliensi agar remaja mampu menolak godaan korupsi; internalisasi kebiasaan positif; serta menciptakan generasi berintegritas. Sementara N4 mengatakan bahwa “Pendidikan karakter penting bagi remaja karena remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa, hal ini mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka di masa depan”. N6 menegaskan bahwa “Pendidikan karakter bagi remaja (generasi muda) sangat penting karena mereka merupakan

pemegang tongkat estafet, penerus, sekaligus orang-orang yang akan menjadi orang besar di kemudian hari.

N5 menyoroti bahwa "Pendidikan karakter penting karena untuk membangun fondasi moral, hal ini krusial untuk membentengi remaja dari pengaruh negative lingkungan dan era digital".

Argumentasi para narasumber ini didukung oleh pandangan (Muhamad. H et al, 2024) yang menyatakan "sebagai penerus bangsa, generasi muda harus dididik tentang prinsip integritas dan anti korupsi sejak kecil agar mereka tidak terjerumus dalam budaya korupsi". Nilai - nilai karakter anti korupsi yang perlu diinternalisasikan.

Nilai-Nilai Karakter Anti Korupsi yang Perlu Diinternalisasikan

Narasumber pertama sampai dengan narasumber kelima menyebutkan nilai-nilai karakter yang saling berkaitan dan saling melengkapi. N1 dan N2 menyebutkan lima nilai: kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kepedulian. N4 juga menyebutkan hal yang sama, serta menambahkan nilai empati dan integritas dalam wawancara kami. N3 memberikan jawaban yang komperehensif, merujuk pada Sembilan nilai integritas KPK RI yaitu jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, berani, peduli, mandiri, kerja keras, dan sederhana. Kemudian N5 juga memberikan jawaban yang sama seperti N3.

Secara konseptual, nilai-nilai yang disebutkan di lapangan tersebut merupakan pilar utama dalam kurikulum pendidikan karakter. Menurut Purnama (2023) dan Nuruddin et al. (2024), nilai-nilai inti tersebut memiliki fungsi spesifik:

1. Integritas: Mendidik siswa bertindak sesuai prinsip moral yang benar, baik saat diawasi maupun tidak. Kejujuran: Menekankan pentingnya berkata dan bertindak lurus di segala situasi.
2. Tanggung Jawab: Mendorong siswa menerima dampak dari tindakan mereka sendiri.
3. Keadilan: Mengajarkan pentingnya memperlakukan orang lain secara setara.
4. Kepedulian: Menumbuhkan rasa peka terhadap kesejahteraan orang lain dan lingkungan sekitar.

Hal ini sinkron dengan temuan empiris Purwaningsih dan Sumartono (2021) yang membuktikan bahwa pendidikan anti-korupsi secara nyata membantu siswa usia SMA dalam membangun tabiat kejujuran tersebut.

Urgensi Pemberian Pendidikan Karakter Anti Korupsi Sejak Usia Remaja

Narasumber kedua sampai dengan narasumber keempat secara tegas mengatakan bahwa pemberian Pendidikan karakter anti korupsi sejak remaja penting karena mereka sedang dalam fase pembentukan karakter.

N1 mengatakan bahwa "sejak remaja, sikap dan kebiasaan sedang dibentuk"

N2 menegaskan bahwa "sejak remaja, seseorang membentuk karakter dan pola pikir. Jika sejak awal belajar dan diajarkan kejujuran dan tanggung jawab, seseorang akan sulit terpengaruh untuk melakukan korupsi".

N3 mengatakan bahwa "masa remaja adalah fase kritis dalam pembentukan karakter dan moral. Mencegah perilaku korupsi dimulai dari hal-hal kecil agar tidak berkembang menjadi korupsi yang lebih besar di masa mendatang".

N4 menyatakan bahwa "Remaja adalah masa yang tepat untuk membentuk karakter dan nilai-nilai positif. Pendidikan karakter dan anti korupsi membantu remaja memahami dampak negatif korupsi dan mengembangkan sikap anti korupsi yang kuat".

N5 menambahkan perspektif yang berbeda dari keempat narasumber lain. Bahwa mengajarkan remaja tentang bahaya korupsi membuat remaja menjadi lebih kebal terhadap Tindakan-tindakan menyimpang yang mengarah pada cikal bakal korupsi".

Strategi Efektif Untuk Implementasi Sikap Anti Koruptif Bagi Remaja

1. Keteladanan. Seluruh narasumber menempatkan keteladanan sebagai strategi fundamental. N3 spesifik menyebut peran orang tua dan guru sebagai teladan dalam memberikan contoh nyata perilaku jujur dan sederhana. Sedangkan N5 tidak menyebutkannya secara spesifik saat ia menyatakan peran orang tua atau guru sebagai teladan. Dalam perspektif teoretis, Yulia R. et al. (2023) mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa orang tua adalah figur terdekat yang paling berpeluang menjadi role model melalui penumbuhan rasa kagum pada anak. Di sekolah, peran ini dilanjutkan oleh guru.
2. Pembiasaan (Habituasi). N3 dan N5 menyatakan bahwa pembiasaan bisa dimulai melalui aturan ketat seperti kantin kejujuran dan tidak memberikan toleransi terhadap kecurangan Menurut Nuruddin et al. (2024), program kantin kejujuran terbukti efektif membentuk karakter individu karena mampu menciptakan ekosistem budaya jujur di sekolah. N5 juga menyebutkan untuk melakukan simulasi anti suap di sekolah dan kampanye digital sebagai pembiasaan kontekstual. Selain itu, N6 menambahkan bahwa di SMAN 3 Palu, pembiasaan juga disalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK). Konsep ini sejalan dengan teori Nuruddin et al. (2024) bahwa kegiatan ekstrakurikuler memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan nilai integritas dalam konteks nyata, sekaligus melatih mereka menjadi agen perubahan (agent of change).
3. Kurikulum Terintegrasi. N3 dan N4 menekankan pentingnya kurikulum terintegrasi yang memasukkan nilai-nilai anti korupsi ke dalam mata pelajaran umum. N6 juga menegaskan bahwa pembelajaran anti korupsi sendiri lebih spesifik di mata pelajaran PPKn. Pendidikan melalui pelajaran PPKn yang dilakukan lapangan ini divalidasi oleh Nuruddin et al. (2024) yang menyebutkan bahwa integrasi pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum sekolah adalah langkah strategis sejak dini.
4. Diskusi kritis dan studi kasus. N2, N3, dan N4 menekankan pentingnya diskusi tentang dampak korupsi dan studi kasus. N2 menekankan pentingnya diskusi tentang dampak korupsi, guna membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. N3 menekankan pentingnya diskusi dan studi kasus membahas tentang dampak negatif korupsi bagi diri sendiri dan negara. Selain itu, N6 juga mengatakan bahwa implementasi pendidikan karakter di SMAN 3 Palu sejauh ini berjalan dengan sangat baik. Contoh konkrit pencegahan dilakukan lewat kontrol ketat guru terhadap pengelolaan uang kas oleh bendahara kelas guna menutup celah manipulasi. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan kasus korupsi di sekolah tersebut sehingga sanksi khusus belum pernah dijatuhkan. Mengenai tantangan, N6 menjelaskan bahwa hambatan yang dihadapi pihak sekolah tidak begitu berat karena siswa/i rata-rata sudah memiliki fondasi karakter dasar yang baik dari lingkungan sebelumnya. Fenomena keberhasilan di SMAN 3 Palu ini mengonfirmasi hasil penelitian terbaru dari Hidayat dan Rahmawati (2023), yang menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi yang diberikan secara menyeluruh, sistematis, dan didukung oleh ekosistem yang bersih, terbukti efektif membentuk perilaku sosial siswa yang pro-integritas serta tegas menentang praktik koruptif.

Peran Guru Dalam Penanaman Nilai Anti Korupsi

N1 menyatakan bahwa "guru menjadi teladan yang mengajarkan siswa untuk jujur dan memiliki rasa dan sikap yang bertanggung jawab".

N2 menegaskan peran guru sebagai pemberi contoh yang baik, mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelajaran dan tidak melakukan kecurangan.

N3 menguraikan peran guru sebagai (1) Teladan yang bertindak adil dan adil dalam menilai siswa, (2) Integrator nilai-nilai anti korupsi ke dalam pembelajaran, (3) Fasilitator dan educator diskusi yang interaktif mengenai nilai-nilai integritas, (4) Pengawas yang disiplin dalam menegakkan aturan di lingkungan sekolah.

N4 menegaskan bahwa guru sangat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan kritis dan analitis untuk menghadapi situasi yang terkait dengan korupsi.

N5 menambahkan bahwa guru dapat menyisipkan nilai anti korupsi ke dalam materi pembelajaran. N5 juga menempatkan pelajaran PPKn sebagai mata pelajaran yang membahas nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan.

Menurut data yang ada pada tabel pertama yang berisi profil narasumber, kami memiliki enam narasumber, yang dimana pada kelima hasil wawancara diatas N6 tidak kami masukkan. Hal ini karena pertanyaan untuk N6 kami pisahkan, sebagai perspektif dari pengajar/guru dari SMA Negeri 3 Palu.

1. Pentingnya Pendidikan karakter bagi remaja untuk menjadi penerus bangsa kedepannya. N6 menegaskan bahwa “Pendidikan karakter anti korupsi bagi generasi muda itu sangat penting, karena generasi muda merupakan pemegang tongkat estafet, penerus, sekaligus orang-orang yang akan menjadi orang besar dikemudian hari”.
2. Upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk Pendidikan karakter anti korupsi. N6 menyatakan bahwa upaya yang dilakukan salah satunya melalui pembelajaran mata pelajaran. Korupsi sendiri lebih spesifik di mata pelajaran PPKn, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa mata pelajaran lain tidak mengajarkan tentang anti korupsi pada pembelajarannya. Selain itu, kegiatan ekstrakulikuler maupun kegiatan seperti Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) juga mengajarkan tentang Pendidikan karakter anti korupsi.
3. Pemberian sanksi apabila siswa/i SMA Negeri 3 Palu melakukan Tindakan menyimpang kearah korupsi. N6 menyatakan bahwa di SMA Negeri 3 Palu belum pernah ada kasus korupsi, sehingga kami belum melakukan pemberian sanksi. Menarik contoh seperti bendahara kelas yang mengelola uang kas kelas, semua dikelola oleh bendahara kelas, dan guru akan terus mengontrol hal tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi.
4. Tantangan yang dihadapi dalam upaya penerapan Pendidikan karakter anti korupsi di lingkungan sekolah. N6 menyatakan bahwa “tantangan yang dihadapi tidak begitu berat, karena siswa/i sudah diajarkan dasar yang membangun karakter mereka, sehingga kami juga tidak begitu sulit dalam mengajarkan Pendidikan karakter tersebut.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data wawancara dan keselarasan dengan berbagai kajian literatur, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Urgensi Eksistensial: Pendidikan karakter anti-korupsi memiliki urgensi yang sangat krusial bagi generasi muda (khususnya Generasi Z). Masa remaja merupakan fase transisi dan pembentukan pola pikir yang kritis. Mengintervensi remaja dengan nilai integritas sejak dini terbukti secara teoretis dan empiris mampu membangun resiliensi (daya tahan) serta memberikan "imunitas" agar mereka kebal dari perilaku menyimpang di masa depan.

2. Harmonisasi Nilai Integritas: Nilai-nilai karakter anti-korupsi yang perlu diinternalisasikan di lapangan saling melengkapi dan bermuara pada **9 Nilai Integritas KPK RI** (jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, mandiri, kerja keras, dan sederhana). Nilai-nilai ini berfungsi sebagai kompas moral bagi remaja dalam mengambil keputusan di tengah kompleksitas era digital.
3. Sinergi Strategi Implementasi: Keberhasilan penanaman sikap anti-koruptif di lingkungan sekolah memerlukan kombinasi empat strategi fundamental yang simultan:
   a. Keteladanan: Orang tua di rumah (sebagai figur terdekat) dan guru di sekolah harus menjadi *role model* utama yang bersih dari kecurangan.
   b. Kurikulum Terintegrasi: Penyisipan materi anti-korupsi pada mata pelajaran umum (khususnya PPKn).
   c. Diskusi Kritis: Pembelajaran berbasis studi kasus nyata mengenai dampak korupsi untuk mengasah logika analitis siswa.
   d. Pembiasaan (Habituasi): Manifestasi praktis lewat program Kantin Kejujuran, pengawasan uang kas kelas, serta kegiatan ekstrakurikuler/LDK untuk mencetak siswa sebagai agen perubahan.
4. Pentingnya Fondasi dan Ekosistem Pendukung: Studi kasus di SMAN 3 Palu membuktikan bahwa tantangan dalam menerapkan pendidikan anti-korupsi menjadi jauh lebih ringan ketika siswa sudah memiliki dasar karakter yang baik dari rumah. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan anti-korupsi yang diberikan secara menyeluruh, sistematis, dan didukung oleh ekosistem sekolah yang transparan terbukti efektif menciptakan budaya jujur dan menolak perilaku koruptif.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, ANI, Asriyani, A., & Aifan, A. (2023). *Penanaman Nilai Dan Prinsip Anti Korupsi Mellui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Smk Negeri 6 Palu.* Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat , 2 (2), 49-53. https://doi.org/10.56338/sambulu_gana.v2i2.2984

Alifiyanto Wibowo. (2022). *Kesadaran Generasi Muda Dalam Mewujudkan Tindakan Anti Korupsi Sebagai Agen Perubahan Untuk Indonesia Lebih Maju.* Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Ganesha , 4 (2), 269–277. https://doi.org/10.23887/gancej.v4i2.1820

Amelia Naim Indrajaya, et al. / *Menumbuhkan Integritas Dengan Mengembangkan Karakter Anti Korupsi Pada Remaja* / 11-20. https://doi.org/10.32924/jscd.v3i1.24

David, M., Arifin, Z., Ramadhoni, D., & Sultan, S. (2023). *Pendidikan Karakter Dan Anti Korupsi: Menjawab Tantangan Moral Generasi Z.* Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ), 2(3), 81-85. https://doi.org/10.30596/pcej.v2i3.16678

Hariwangsa, T., & Yuningsih, H. (2024). *Upaya Penegakan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi.* Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda , 30 (4), 121-130. https://doi.org/10.46839/disiplin.v30i4.1160

Irsyadi, M. H., & Arifani, K. B. (2024). *Pengaruh Pendidikan Anti-Korupsi Terhadap Perilaku Generasi Muda Di Indonesia.* Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(04), 306-316. https://doi.org/10.23969/jp.v9i04

Nurudin, N., Nur Fauzi, MA, & Barory, C. (2024). *Pendidikan Anti Korupsi: Konsep Pendidikan Karakter Dan Tantangannya.* Pendidik , 2 (1), 19–26. https://doi.org/10.69914/educatus.v2i1.8

Peran Pendidikan dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. (2025). Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner , 2(03). https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1044

Rahmayanti, Y., & Awalunisah, S. (2023). *Pentingnya Peran Keluarga Dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi*. Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah, 3(1), 8-15.

Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., and I. G. K. Ariawan. *Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi*. Acta Comitas, vol. 03, 2 Apr. 2018, pp. 17-25, doi:10.24843/AC.2018.v03.i01.p02.